

# **RANCANGAN AKHIR RENSTRA**

## **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai strategi, program, dan kegiatan Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2026.

Dalam penyusunan Renstra ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan, sehingga Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada gilirannya nanti dapat mengantarkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi masyarakat yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, September 2021

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PETERNAKAN,



**SUTIKNO, SP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196505051987091003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan .....	5
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Peternakan .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan .....	23
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi .....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara (2013-2033) .....	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	36
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	40
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	42
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	44
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	50
VIII. PENUTUP .....	54

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2020 .....	9
Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	10
Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Esselon dan Jabatan Tahun 2020 .....	10
Tabel 2.4 Jumlah Prasarana dan Sarana OPD Per 31 Desember 2020 .....	12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2020 .....	21
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2021 .....	22
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran .....	25
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Timur .....	30
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 .....	41
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	43
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan .....	45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 .....	51

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memanage strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai peran penting dan strategis. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan di subsektor pertanian dan peternakan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi kerakyatan yang melibatkan sebagian besar lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran), peningkatan pendapatan masyarakat (mengurangi angka kemiskinan) maupun mendukung kondisi yang kondusif dan sinergi dengan sektor lainnya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan guna untuk mewujudkan tujuan RPJMD tahun 2021-2026 dan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Strategi pembangunan pertanian dan peternakan yaitu pengembangan pertanian berbasis kawasan. Adapun agenda utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing, serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian/peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani/peternak.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain :

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.

- b. Mewujudkan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga memberikan kontribusi bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026.
- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- d. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I.** Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II.** Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bab III.** Permasalahan dan Isu-isu Strategis, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaah Renstra K/L; Telaah RTRW serta Penentuan Isu-Isu Strategi.
- Bab IV.** Tujuan dan Sasaran, berisi uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta indikator setiap tujuan/sasaran tersebut.
- Bab V.** Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI.** Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, berisi uraian tentang rencana Kerja berupa Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII.** Penutup, berisi uraian tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pertanian dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedudukan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan urusan otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanian dan Peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian dan Peternakan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian dan Peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanian dan Peternakan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pertanian dan peternakan antara lain :

- a. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan di sub sektor pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan 27 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) baik di level kecamatan maupun Balai Benih Pembantu di sub sektor pertanian dan peternakan yang tersebar di 18 kecamatan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut :

#### **2.1.1 Sekretariat**

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, merumuskan, mengendalikan urusan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur Dinas Pertanian dan Peternakan, termasuk urusan kepegawaian, keuangan, perundang-undangan, surat menyurat, penyusunan program, monitoring dan evaluasi, pendataan dan pelaporan. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

### **2.1.2 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Melaksanakan, memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta mengkonsultasikan perencanaan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan pengembangan/peningkatan produktivitas dan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dalam menjalankan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan
- b. Seksi Produksi Hortikultura
- c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

### **2.1.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan bidang pengembangan ternak dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi hasil peternakan. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi Perbibitan ternak
- b. Seksi Budidaya Ternak
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

### **2.1.4 Bidang Usaha dan Penyuluhan**

Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan bidang usaha dan penyuluhan rangka peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu :

- a. Seksi Usaha dan Kemitraan
- b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil
- c. Seksi Penyuluhan

### **2.1.5 Bidang Prasarana dan Sarana**

Melaksanakan, memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta mengkonsultasikan perencanaan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam urusan pengembangan Prasarana dan sarana sebagai penunjang

peningkatan produktivitas dan produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- a. Seksi Lahan dan Irigasi
- b. Seksi Pupuk dan Pestisida
- c. Seksi Alat, Mesin, dan Sarana Usaha

#### **2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan**

Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan yang tersebar di 18 Kecamatan dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pendataan, perencanaan, mengkoordinasikan, bimbingan teknis dan pembinaan pembangunan pertanian di tingkat Kecamatan masing-masing.

UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan dikepalai oleh Kepala UPT yang dibantu oleh Kepala Tata Usaha di bidang Administrasi dan Teknis Perkantoran yang membawahi beberapa staf administrasi dan teknis fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan juga berkoordinasi dengan Camat dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

#### **2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pembantu dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

UPT Balai Benih Pembantu dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura saat ini berkedudukan di :

- a. UPT Balai Benih Pembantu (BBP) Tanaman Pangan di Kecamatan Loa Kulu
- b. UPT Balai Benih Pembantu (BBP) Hortikultura di Kecamatan Tenggarong
- c. UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kecamatan Tenggarong

UPT Balai Benih Pembantu tersebut di atas mempunyai tugas pokok sebagai penyedia benih/bibit unggul Nasional yang akan disebar ke tingkat petani. Sedangkan UPT Balai Proteksi melaksanakan tugas pengembangan teknologi dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.

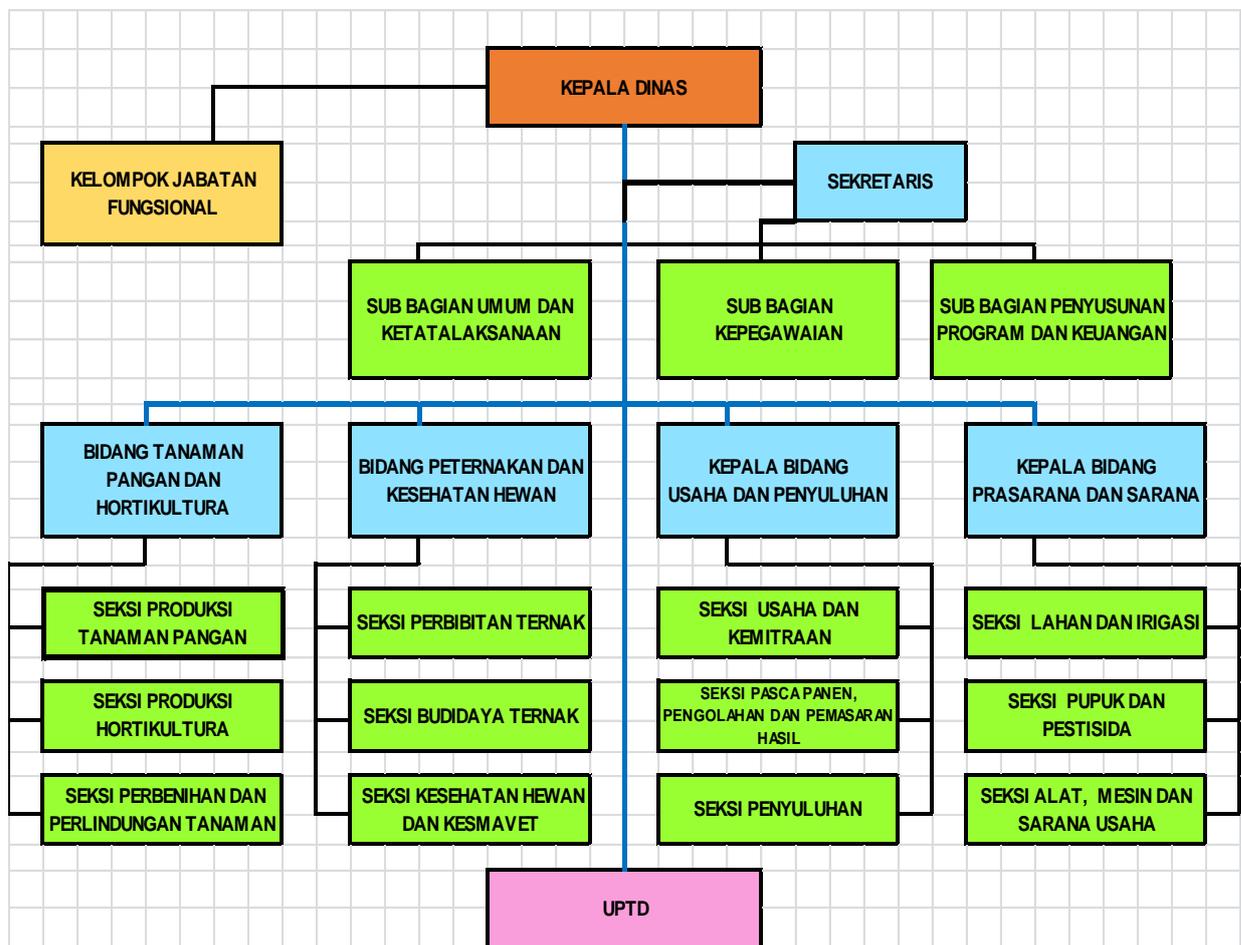
UPT Balai Benih Pembantu (BBP) dan Balai Proteksi dikepalai oleh Kepala UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Tata Usaha di bidang Administrasi dan Teknis Perkantoran, yang membawahi beberapa staf administrasi dan teknis fungsional.

### 2.1.8 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Peternakan

UPT Teknis Peternakan meliputi :

- a. UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Tenggara
- b. UPT Pembibitan Sapi Potong Muara Kaman Desa Lebaho Ulaq
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan Samboja
- d. UPT Pusat Kesehatan Hewan Muara Badak
- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan Tenggara Seberang
- f. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kota Bangun

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan urusan pertanian dan Peternakan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Tenaga Harian Lepas (THL) daerah serta THL dari Pusat yang merupakan Penyuluh Pertanian dan Dokter Hewan, dimana semua sumber daya aparatur tersebut tersebar di 18 kecamatan. Menurut data per 1 Januari 2020, jumlah ASN adalah sebanyak 417 orang. Adapun data-data pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1 **Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2020**

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda - IV/c	1	0	1
Pembina Tingkat I - IV/b	15	6	21
Pembina - IV/a	23	4	27
Penata Tingkat I - III/d	54	30	84
Penata - III/c	36	19	55
Penata Muda Tingkat I - III/b	33	17	50
Penata Muda - III/a	16	5	21
Pengatur Tingkat I - II/d	75	51	126
Pengatur - II/c	42	10	52
Pengatur Muda Tingkat I - II/b	9	2	11
Pengatur Muda - II/a	13	6	19
Juru Tingkat I - I/d	2	1	3
Juru – Ic	1	0	1
Juru Muda Tingkat I – Ib	-	-	-
Juru Muda – Ia	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>320</b>	<b>151</b>	<b><u>471</u></b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

Tabel 2.2 Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	11	5	16
S1	144	76	220
Diplloma III	14	6	20
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	144	62	206
SLTP	4	1	5
SD	3	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>320</b>	<b>151</b>	<b><u>471</u></b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

Tabel 2.3 Jumlah ASN Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Berdasarkan Esselon dan Jabatan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Esselon IIb	1	-	1
Esselon IIIa	-	-	-
Esselon IIIb	4	-	4
Esselon IV/a	33	6	39
Esselon IV/b	18	7	25
JFU / JFT dan Penyuluh	264	138	402
<b>Jumlah</b>	<b>320</b>	<b>151</b>	<b><u>471</u></b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas Pertanian dan Peternakan, 2020

Berdasarkan analisis beban kerja yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, jika dibandingkan dengan jumlah aparatur, maka jumlah tersebut cukup memadai. Namun dari segi kualitas sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal.

Adapun prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang bersifat teknis maupun non teknis terdiri dari :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari 26 unit meliputi tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk kebun Dinas.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang ada di Dinas Kabupaten maupun yang ada di UPTD serta masyarakat.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Gedung dan Bangunan untuk Kantor Dinas Kabupaten, UPTD serta Bangunan lainnya yang ada di masyarakat.

4. Jalan dan Jaringan

Jalan dan Jaringan Irigasi yang pernah dibangun oleh Dinas Pertanian dan Peternakan tersebar di beberapa Kecamatan sebagai sarana untuk transportasi masyarakat menuju lahan persawahan serta sebagai sarana untuk melakukan pengairan terhadap sawah petani.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya ini merupakan aset diluar empat aset sebelumnya seperti Sapi dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan baku pembuatan kompos, buku-buku serta yang lainnya.

Keadaan sarana dan prasarana selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 2.4

**Tabel 2.4 Jumlah Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Per 31 Desember 2020**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya	1 Unit	
2	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1 Unit	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	23 Unit	
4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1 Unit	
5	Crawler Tractor	54 Unit	
6	Tractor Lain-lain	7 Unit	
7	Portable Generating Set	5 Unit	
8	Transportable Water Pomp	7 Unit	
9	Portable Water Pump	106 Unit	
10	Stationary Water Pump	2 Unit	
11	Station Wagon	24 Unit	
12	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	4 Unit	
13	Kendaraan Dinas Esselon III	1 Unit	
14	Pick Up	7 Unit	
15	Sepeda Motor	483 Unit	
16	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	1 Unit	
17	Gerobak Dorong	21 Unit	
18	Angkutan Barang Lain-lain	1 Unit	
19	Alat Angkut Apung Motor Brg Lain-lain	7 Unit	
20	Klotok	16 Unit	

21	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	1 Unit	
22	Batteray Charger	10 Unit	
23	Steam Cleaner	1 Unit	
24	Tripot	4 Unit	
25	Global Positioning System	25 Unit	
26	Scanner	2 Unit	
27	Air Conditioning Unit	36 Unit	
28	Timbangan	4 Unit	
29	Traktor Tangan dengn peralatannya	75 Unit	
30	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	105 Unit	
31	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	27 Unit	
32	Alat Penggilingan Padi	1 Unit	
33	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	4 Unit	
34	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	293 Unit	
35	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	24 Unit	
36	Alat Perontok (Theresar Pedal)	20 Unit	
37	Alat Perontok Mesin (Power Theresar)	46 Unit	
38	Alat Panen Lain-lain	4 Unit	
39	Alat Penyimpanan Lain-lain	1 Unit	
40	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	7 Unit	
41	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	27 Unit	
42	Mesin Ketik Listrik Portable	1 Unit	
43	Mesin Ketik Lain-lain	18 Unit	
44	Mesin Hitung Manual	15 Unit	
45	Mesin Hitung Elektronik	20 Unit	
46	Mesin Absen (Time Recorder)	28 Unit	

47	Mesin Calculator	50 Unit	
48	Mesin Penghitung Uang	2 Unit	
49	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	2 Unit	
50	Mesin Stensil Listrik Folio	25 Unit	
51	Lemari Besi	8 Unit	
52	Rak Besi/Metal	2 Unit	
53	Rak Kayu	8 Unit	
54	Filling Besi/Metal	13 Unit	
55	Filling Kayu	2 Unit	
56	Lemari Kaca	17 Unit	
57	Lemari Makan	2 Unit	
58	Alat Penghancur Kertas	8 Unit	
59	Papan Nama Instansi	22 Unit	
60	Papan Pengumuman	27 Unit	
61	Papan Tulis	2 Unit	
62	White Board	26 Unit	
63	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	
64	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	416 Unit	
65	Partisi	1 Unit	
66	Lemari Kayu	37 Unit	
67	Rak Kayu	1 Unit	
68	Meja Kayu/Rotan	22 Unit	
69	Kursi Besi/Metal	1 Unit	
70	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 Unit	
71	Meja Rapat	7 Unit	
72	Meja Podium	1 Unit	

73	Kursi Rapat	14 Unit	
74	Kursi Tamu	1 Unit	
75	Kursi Putar	11 Unit	
76	Meja Piket	1 Unit	
77	Tenda	2 Unit	
78	Meja Biro	2 Unit	
79	Sofa	11 Unit	
80	MOUBILER LAINNYA	1 Unit	
81	Jam Mekanis	2 Unit	
82	Jam Elektronik	2 Unit	
83	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	
84	Mesin Potong Rumput	20 Unit	
85	Lemari Es	1 Unit	
86	AC Unit	4 Unit	
87	AC Split	1 Unit	
88	Kipas Angin	22 Unit	
89	Kompas Gas	1 Unit	
90	Tabung Gas	2 Unit	
91	Alat Dapur Lain-lain	1 Unit	
92	Radio	3 Unit	
93	Televisi	3 Unit	
94	Sound System	4 Unit	
95	Wireless	20 Unit	
96	Microphone	8 Unit	
97	Microphone Floor Stand	4 Unit	
98	Microphone Table Stand	1 Unit	

99	Unit Power Supply	9 Unit	
100	Camera Video	5 Unit	
101	Tustel	12 Unit	
102	Gambar Presiden/Wakil Presiden	30 Unit	
103	Tiang Bendera	1 Unit	
104	Tangga Alumunium	2 Unit	
105	Dispenser	6 Unit	
106	Handy Cam	5 Unit	
107	Alat Rumah Tangga Lain-lain	701 Unit	
108	Alat Pemadam Portable	3 Unit	
109	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	6 Unit	
110	CCTV	1 Unit	
111	P.C Unit	55 Unit	
112	Lap Top	97 Unit	
113	Note Book	65 Unit	
114	Personal Komputer Lain-lain	9 Unit	
115	Ploter	1 Unit	
116	Hard Disk	29 Unit	
117	Printer	143 Unit	
118	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1 Unit	
119	CPU	8 Unit	
120	Monitor	11 Unit	
121	Scanner	1 Unit	
122	External	12 Unit	
123	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	10 Unit	
124	Server	1 Unit	

125	Router	6 Unit	
126	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Unit	
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	
128	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10 Unit	
129	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22 Unit	
130	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1 Unit	
131	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	208 Unit	
132	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	11 Unit	
133	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2 Unit	
134	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Unit	
135	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 Unit	
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	
140	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	
141	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	
142	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Unit	
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25 Unit	
144	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	360 Unit	
145	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	297 Unit	
146	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	45 Unit	
147	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	2 Unit	
148	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	37 Unit	
149	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	6 Unit	
150	Camera + Attachment	3 Unit	

151	Proyektor + Attachment	9 Unit	
152	Audio Amplifier	3 Unit	
153	Microphone/Wireless Mic	5 Unit	
154	Unintemuptible Power Supply (UPS)	45 Unit	
155	Peralatan studio Visual Lain-lain	5 Unit	
156	Camera Electronic	48 Unit	
157	Alat Pengolah Data	2 Unit	
158	Peralatan Computing Lain-lain	2 Unit	
159	Kompas	1 Unit	
160	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	32 Unit	
161	Telephone (PABX)	2 Unit	
162	Pesawat Telephone	17 Unit	
163	Telephone Mobile	1 Unit	
164	Facsimile	3 Unit	
165	Handphone	34 Unit	
166	Alat Komunikasi Lain-lain	2 Unit	
167	Wireless Amplifier	1 Unit	
168	Mesin Potong Jerami	18 Unit	
169	Stabilizer	1 Unit	
170	Evaporator	1 Unit	
171	Kompor Gas	1 Unit	
172	Universal Miling Machine	1 Unit	
173	Mesin Vacum Trocner Dryne	1 Unit	
174	Generator	1 Unit	
175	Grain Moisture Tester	7 Unit	
176	Personal Komputer	62 Unit	

177	Dryer	2 Unit	
178	Meja Kerja	41 Unit	
179	Kabel Listrik (Electrical)	1 Unit	
180	Bendera Merah Putih	25 Unit	
181	Generator Set (Lab Scale)	2 Unit	
182	Vacuum Drying Oven	2 Unit	
183	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39 Unit	
184	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	88 Unit	
185	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3 Unit	
186	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1 Unit	
187	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	3 Unit	
188	Bangunan Gudang Lain-lain	3 Unit	
189	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1 Unit	
190	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit	
191	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 Unit	
192	Bangunan Pagar Kantor	1 Unit	
193	Rumah Negara Golongan I Type E Permanen	1 Unit	
194	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1 Unit	
195	Jalan Desa Lain-lain	10 Unit	
196	Saluran Induk	2 Unit	
197	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2 Unit	
198	Tanggul Banjir	1 Unit	
199	Pintu Air	1 Unit	
200	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	2 Unit	
201	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1 Unit	
202	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	1 Unit	

203	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2 Unit	
204	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 Unit	
205	Jaringan Pembawa Lain-lain	1 Unit	
206	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1 Unit	
207	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	1 Unit	
208	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 Unit	
209	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1 Unit	
210	Buku Umum Lain-lain	1 Unit	
211	Peta Topografi	1 Unit	
212	Sapi	16 Ekor	Mati

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pertanian dan Peternakan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan tata kelola pemerintah yang bersih, jujur, dan berwibawa.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Pertanian dan Peternakan akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat, tetapi juga berdaya saing terhadap produk luar.

Adapun gambaran kondisi aktual pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020**

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan</b>															
<b>1.1</b>	<b>Padi</b>															
	A. Padi Saw ah (ton)	5.103	5.104	5.109	5.201	5.202	5.101	5.101	5.103	5.103	5.113	99,96	99,94	99,88	98,12	98,29
	B. Padi Ladang (ton)	3.171	3.186	3.200	3.250	3.297	3.182	3.197	3.218	3.224	3.245	100,35	100,35	100,56	99,20	98,42
<b>1.2</b>	<b>Palaw ija</b>															
	A. Jagung (ton)	3.190	3.213	3.225	3.245	3.271	3.198	3.238	3.248	3.350	3.752	100,25	100,78	100,71	103,24	114,70
	B. Kedelai (ton)	1.480	1.493	1.502	1.511	1.523	1.478	1.490	1.493	1.797	1.440	99,86	99,80	99,40	118,93	94,55
	C. Ubi Kayu (ton)	14.220	16.898	18.142	19.061	20.000	14.240	16.920	18.253	20.034	22.652	100,14	100,13	100,61	105,10	113,26
	D. Ubi Jalar (ton)	10.459	10.472	10.492	10.517	10.529	10.416	10.463	10.496	10.636	10.858	99,59	99,91	100,04	101,13	103,12
	E. Kacang Tanah (ton)	1.392	1.395	1.408	1.417	1.425	1.383	1.394	1.397	1.370	1.327	99,35	99,93	99,22	96,68	93,12
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produksi komoditi segar tanaman pangan</b>															
<b>2.1</b>	<b>Padi</b>															
	A. Padi Saw ah (ton)	196.023	196.800	197.523	197.625	197.975	198.023	188.803	189.393	180.811	173.848	101,02	95,94	95,88	91,49	87,81
	B. Padi Ladang (ton)	15.710	15.852	15.903	16.057	16.198	15.210	13.535	14.353	13.690	12.982	96,82	85,38	90,25	85,26	80,15
<b>2.2</b>	<b>Palaw ija</b>															
	A. Jagung (ton)	3.623	3.675	3.702	3.715	3.725	2.015	1.881	1.342	834	1.576	55,62	51,18	36,25	22,45	42,31
	B. Kedelai (ton)	491	516	527	531	549	541	429	551	232	154	110,18	83,14	104,55	43,69	28,05
	C. Ubi Kayu (ton)	20.577	20.717	21.008	22.111	23.440	17.614	15.269	21.027	23.260	21.701	85,60	73,70	100,09	105,20	92,58
	D. Ubi Jalar (ton)	8.564	8.654	8.773	8.846	8.926	6.864	5.954	6.738	6.637	5.299	80,15	68,80	76,80	75,03	59,37
	E. Kacang Tanah (ton)	852	861	874	884	891	712	651	686	680	463	83,57	75,61	78,49	76,92	51,96
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produksi komoditi segar tanaman Hortikultura</b>															
<b>3.1</b>	<b>Hortikultura</b>															
	A. Tanaman Buah (ton)	51.059	57.189	58.958	61.457	62.686	53.508	57.389	61.667	80.419	65.354	104,80	100,35	104,59	130,85	104,26
	B. Sayuran (ton)	22.843	22.982	23.096	23.128	23.265	18.343	20.282	26.900	36.467	36.967	80,30	88,25	116,47	157,67	158,90
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya peningkatan populasi Ternak</b>															
4.1	Sapi	30.258	34.285	39.085	44.557	50.795	28.968	29.465	28.604	27.509	30.030	95,74	85,94	73,18	61,74	59,12
4.2	Kerbau	3.535	3.889	4.278	4.706	5.176	3.367	3.421	2.441	2.394	2.728	95,25	87,97	57,06	50,87	52,70
4.3	Kambing	8.066	8.873	9.760	10.736	11.809	8.450	8.585	10.468	11.008	12.370	104,76	96,75	107,25	102,53	104,75
4.4	Babi	4.585	5.044	5.548	6.103	6.713	4.585	4.837	3.553	3.594	4.336	100,00	95,90	64,04	58,89	64,59
4.5	Ayam Buras	1.225.665	1.348.232	1.483.055	1.631.360	1.794.496	1.371.900	1.514.100	815.397	398.951	377.727	111,93	112,30	54,98	24,46	21,05
4.6	Ayam Ras Pedaging	15.308.140	16.838.954	18.522.849	20.375.134	22.412.647	13.179.400	13.844.000	9.834.156	14.141.180	14.251.800	86,09	82,21	53,09	69,40	63,59
4.7	Ayam Ras Petelur	310.432	341.475	375.623	413.185	454.503	210.400	282.000	205.085	180.210	393.970	67,78	82,58	54,60	43,61	86,68
4.8	Itik	41.347	45.482	50.030	55.033	60.536	42.355	43.625	78.094	66.622	59.835	102,44	95,92	156,09	121,06	98,84

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2021**

No.	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	0	0	100,00%	0	-	-	-
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian	3.589.628.000	1.101.052.480	7.527.931.000	-	-	3.101.763.700	1.017.234.500	6.538.531.092	-	-	86,41%	92,39%	86,86%	0	-	44,81%	45,19%
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian	-	-	100.000.000	509.306.000	-	-	-	97.785.000	294.037.000	-	0	0	97,79%	57,73%	-	-	-
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	6.196.898.767	926.395.200	10.137.337.000	5.940.646.500	-	72.071.500	723.930.915	4.387.642.202	1.176.012.000	-	1,16%	78,14%	43,28%	19,80%	-	-1,40%	153,64%
5	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	-	-	-	35.225.570.450	-	-	-	-	30.536.047.796	-	0	0	0	86,69%	-	-	-
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	-	877.220.000	1.415.700.000	-	-	-	841.061.250	1.378.640.937	-	0	0	95,88%	97,38%	-	-	-
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	3.000.000.000	-	5.497.950.000	-	-	2.649.572.150	-	4.371.273.100	-	-	88,32%	0	79,51%	0	-	-	-
8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	2.617.820.666	815.000.000	7.819.515.243	-	-	1.622.620.250	750.182.500	5.901.228.228	-	0	61,98%	92,05%	75,47%	-	72,83%	90,71%
9	Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	145.606.000	-	0	0	0	97,07%	-	-	-
10	Program peningkatan penerapan teknologi penyuluhan pertanian	-	-	350.000.000	-	-	-	-	280.784.000	-	-	0	0	80,22%	0	-	-	-
11	Program penanggulangan kemiskinan bidang pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
12	Program Revolusi Jagung	-	1.300.000.000	9.493.858.860	8.999.868.000	-	-	1.279.764.200	7.578.261.402	490.184.830	-	0	98,44%	79,82%	5,45%	-	163,12%	-38,11%
13	Program penanggulangan kemiskinan bidang peternakan	-	-	-	1.010.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
14	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	-	-	406.512.000	-	-	-	-	405.161.930	-	0	0	0	99,67%	-	-	-
15	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-	644.029.000	-	-	-	-	600.951.500	-	-	0	0	93,31%	0	-	-	-
16	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	-	1.337.757.000	4.659.065.000	1.070.000.000	-	-	707.013.900	2.697.616.585	-	-	0	52,85%	57,90%	0,00%	-	-	-
Jumlah		12.786.526.767	7.283.025.346	40.177.390.860	62.547.118.193	-	5.823.407.350	5.350.563.765	28.219.088.631	40.326.918.721	-	45,54%	73,47%	70,24%	64,47%	-	69,75%	90,61%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan. Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi.

### 2.4.1 Tantangan

- a. Kemampuan petani dalam penerapan paket teknologi masih rendah.
- b. Infrastruktur & prasarana pengembangan pertanian belum memadai.
- c. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
- d. Dampak perubahan fenomena iklim dan gangguan OPT terhadap peningkatan produksi
- e. Kurangnya minat pemuda untuk kegiatan usaha tani.

### 2.4.2 Peluang

- a. UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- b. Pengembangan pertanian tanaman pangan merupakan skala prioritas dalam program **KUKAR IDAMAN (Inovatif, DAYa Saing dan MANDiri)**.
- c. Memiliki Potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan.
- d. Peluang pasar dan kemitraan agribisnis cukup besar.
- e. Tersedia sumberdaya kelompok masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian.
- f. Adanya program percepatan modernisasi pertanian.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun sebelumnya, maka permasalahan pokok pembangunan pertanian dan peternakan adalah **belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta kesejahteraan petani masih rendah.**

Penyebab masalah pokok antara lain adalah produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah, populasi ternak ruminansia masih rendah dan kualitas komoditi pertanian masih rendah.

Akar Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian peternakan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Petani penggunaan benih unggul masih rendah;
2. Panjang badan jalan usaha tani masih kurang;
3. Kurangnya peningkatan mutu Jalan Usaha Tani;
4. Design kawasan pengembangan padi belum tertata;
5. Kesesuaian lahan belum ada;
6. Pengadaan bantuan benih belum sesuai kebutuhan;
7. Penyerapan produksi benih padi dari penangkar/produsen benih belum maksimal;
8. Jumlah alat mesin masih terbatas;
9. Kurangnya ketersediaan pupuk (subsidi);
10. Keterbatasan alat panen dan pasca panen;
11. Terganggunya sumber air oleh aktivitas sektor lain;
12. Sistem irigasi belum terintegrasi sampai ke sawah petani dan sebagian besar mengalami pendangkalan;
13. Jumlah embung masih kurang;
14. Jaringan irigasi belum tersedia maksimal;
15. Sebagian besar sumber air sawah hanya berasal dari hujan (tadah hujan);
16. Pendampingan petugas kepada petani/poktan belum efektif;
17. Pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian HPT/OPT masih terbatas;

18. Petugas teknis pengendali HPT/OPT belum ada;
19. Tingkat kepemilikan ternak masih sedikit;
20. Mutu pakan ternak rendah;
21. Tingkat mortalitas (kematian masih tinggi);
22. Masih sering terjadinya serangan penyakit;
23. Terjadi kawin dalam (Inbreeding).

Identifikasi masalah pokok, masalah spesifik (rumusan masalah) dan akar masalah dalam pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura cenderung mengalami penurunan	1. Produktivitas dan Kualitas Rendah	1.1 Kesadaran Petani penggunaan benih unggul masih rendah
		2. Aksesibilitas (JUT)	2.1 Panjang badan jalan usaha tani masih kurang 2.2 Kurangnya peningkatan mutu Jalan Usaha Tani
		3. Konversi Lahan	3.1 Design Kawasan Pengembangan Padi belum tertata 3.2 Kesesuaian Lahan belum ada
		4. Sapropodi dan Mekanisasi	4.1 Pengadaan bantuan benih belum sesuai kebutuhan 4.2 Penyerapan Produksi benih padi dari penangkar/produsen benih belum maksimal 4.3 Jumlah alat mesin masih terbatas 4.4 Kurangnya ketersediaan pupuk (subsidi)
		5. Kehilangan Hasil (Panen dan Pasca Panen)	5.1 Keterbatasan alat panen dan pasca panen

		6. Irigasi (pengairan)	6.1 Terganggunya sumber air oleh aktivitas sektor lain 6.2 Sistem irigasi belum terintegrasi sampai ke sawah petani dan sebagian besar mengalami pendangkalan 6.3 Jumlah embung masih kurang 6.4 Jaringan irigasi belum tersedia maksimal 6.5 Sebagian besar sumber air sawah hanya berasal dari hujan (tadah hujan)
		7. SDM (RTP Menurun dan penyuluh terbatas)	7.1 Pendampingan petugas kepada petani / poktan belum efektif 7.2 Pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian HPT/OPT masih terbatas 7.3 Petugas Teknis Pengendali HPT/OPT belum ada
2.	Produksi dan kualitas Ternak ruminansia masih rendah	1. Populasi ternak ruminansia masih rendah	1.1 Tingkat kepemilikan ternak masih sedikit 1.2 Mutu pakan ternak rendah 1.3 Tingkat mortalitas (kematian masih tinggi) 1.4 Masih sering terjadinya serangan penyakit
		2. Mutu genetik cenderung menurun	2.1 Terjadi kawin dalam (Inbreeding)

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mewujudkan amanat konstitusi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode pemerintahan 2021 -2026, secara moral dan material akan melanjutkan pembangunan Kutai Kartanegara dengan mengangkat konsep pembangunan “**KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya SAing dan MANDiri)**”, komitmen ini akan diwujudkan dengan visi “**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**”.

Visi Kutai Kartanegara 2021–2026 tersebut didasari pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yakni *Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerataan pembangunan berbasis potensi dan Pembangunan berwawasan lingkungan yang lestari*, yang dilakukan dengan

mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki (potensi daerah) didasarkan atas prinsip keterpaduan antara pendekatan sektoral dan kewilayah.

Adapun parameter visi Kukar Idaman, Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia adalah :

**Sejahtera** : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

**Berbahagia** : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjamin keberhasilan visi maka disusun 5 (Lima) **Misi** Pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Program Unggulan Kukar Idaman yang terkait dengan Dinas Pertanian dan peternakan ada pada **Misi 3** yaitu **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**.

**Program pembangunan pertanian berbasis kawasan** merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi Kutai Kartanegara dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infratsruktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian RI (Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020), tahun 2020 - 2024**

Visi yang tertuang dalam renstra kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sedangkan tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran yang menjadi prioritas pembangunan pertanian secara nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sementara itu, di dalam Renstra Kementerian Pertanian tertuang pula masalah pembangunan pertanian secara nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Lahan
  - Konversi lahan yang tidak terkendali
  - Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru
  - Penurunan kualitas lahan
  - Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit
  - Ketidakpastian status kepemilikan lahan

2. Infrastruktur
  - Kerusakan jaringan irigasi yang tinggi
  - Pendangkalan waduk
  - Kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak
3. Benih
  - Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam
  - Belum terbangunnya system pembibitan yang memadai
4. Regulasi/Kelembagaan
  - Perizinan investasi untuk pengembangan integrasi sawit-sapi
  - Perizinan HGU investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaannya kecuali untuk tebu
  - Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
5. SDM
  - Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju masih rendah
  - Menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian
  - Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, pengawas benih tanaman, serta tenaga kesehatan hewan
6. Permodalan
  - Sulitnya akses petani terhadap permodalan
  - Tunggakan kredit usahatani belum terselesaikan
  - Persyaratan agunan kredit yang rumit

Di dalam Renstra tersebut juga disampaikan Isu-Isu Strategis (5 Tahun ke depan), diantaranya yaitu :

1. **Kecukupan produksi** komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) serta pengurangan ketergantungan impor;
2. Peningkatan **daya saing produk** di dalam negeri /antisipasi pasar bebas AEC (ASEAN *Economic Community* 2015), Indonesia sebagai target pasar;
3. **Pemantapan dan peningkatan daya saing** produk pertanian di dunia internasional;
4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu; dan
5. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.

### **3.3.2 Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur (2019 – 2023)**

Dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengemban tupoksinya, juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun berbagai permasalahan pelayanan yang terurai dalam renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masih Terbatas
3. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan
4. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian
5. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
6. Belum Optimalnya Kelembagaan Petani
7. Semakin Berkurangnya Minat Generasi Muda
8. Terbatasnya SDM Pertanian
9. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Sektor

Dalam rangka menuntaskan permasalahan pelayanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya yaitu:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Prov. Kaltim tahun 2016-2036
2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian
3. Terbukanya peluang pasar
4. UU Nomor 41 tahun 2009 tentang PL2B dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Pemanfaatan Teknologi Pertanian
6. Adanya kelembagaan penyuluh pertanian
7. Mekanisasi Pertanian
8. Pelatihan/Diklat bagi petugas Pertanian
9. Penerimaan pegawai bagi petugas pertanian
10. Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah

**Tabel 3.2      Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur**

<b>VISI    : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat</b>							
<b>MISI 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan</b>							
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Target Kinerja sasaran pada tahun</b>				
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Meningkatnya	Kontribusi	0,52 %	0,53	0,53	0,55	0,56	0,57

Kontribusi Pertanian sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB	Lapangan Usaha Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB						
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.3.3 Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur (2019 – 2023)

Selain Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengacu pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun berbagai permasalahan pelayanan yang terurai dalam renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah;
2. Produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal;
3. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal; serta
4. Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet belum optimal.

Dalam rangka menuntaskan permasalahan pelayanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya yaitu :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
4. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet;
5. Peningkatan daya saing produk peternakan;
6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;
7. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian; dan
8. Peningkatan implemmtasi akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur**

<b>VISI : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat</b>							
<b>MISI 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan</b>							
Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja sasaran pada tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	0,31 %	0,33 %	0,34 %	0,35 %	0,36 %	0,37 %

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)

Dalam mengemban Tupoksi Pembangunan Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Telaahan Renstra SKPD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat dari 9 satuan fisiografi, dengan diskripsi masing-masing satuan sebagai berikut :

1. Daerah rawa pasang surut (Tidak Swamp)  
Adalah daerah dataran di tepi pantai yang selalu di pengaruhi oleh pasangsurut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove. Bentuk wilayahnya bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi.
2. Daerah dataran alluvial (Alluvial Plain)  
Adalah daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan didaerah muara dan lereng-lereng bukit/pegunungan. Bentuk wilayahber morfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan dataran alluvial ini adalah 2.251,19 Km<sup>2</sup> atau 8.62 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Daerah jalur kelokan sungai (Meander Belt),  
Adalah daerah jalur meander sungai yang mempunyai tanggul sungai yang lebar. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan

perbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan jalur kelokansungai ini adalah 1.400,93 Km<sup>2</sup> atau 5,36 % dari luas wilayah KutaiKartanegara.

4. Daerah rawa (Swamp)

Adalah daerah dataran banjir yang selalu tergenang air, rawa bergambutatau dataran banjir berawa di lembah yang sempit. Bentuk wilayahber morfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % danperbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas rawa ini adalah 2.691,71 Km<sup>2</sup> atau9,87 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Daerah lembah alluvial (Alluvial Valley)

Adalah daerah dataran di lembah atau di kiri-kanan jalan aliran sungaidengan berbukit atau tidak berbukit. Bentuk wilayah bermorfologi datarandengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1meter. Luas satuan lembah alluvial ini adalah 85,03 Km<sup>2</sup> atau 0,33 % dari luaswilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Daerah teras (Terrain)

Adalah daerah berteras, baik yang dipengaruhi laut maupun teras berpasiryang datar dan tertutup gambut yang dangkal atau teras berpasir dengan bentuk wilayah bergelombang. Bentuk wilayah bermorfologi dataran denganvariasi kelerengan kurang dari 8 % dan perbedaan tinggi kurang dari 10meter. Luas satuan teras ini adalah 880,22 Km<sup>2</sup> atau 3,37 % dari luas wilayahKabupaten Kutai Kartanegara.

7. Daerah dataran (Plain),

Adalah daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuanbeku asam dan dataran basalt. Bentuk wilayah bergelombang sampai berbukitdengan variasi kelerengan kurang dan 2-40 % dan perbedaan tinggi kurang dari 50 meter. Luas satuan dataran ini adalah 8.583, 13 Km<sup>2</sup> atau 32,86 % danluas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Daerah perbukitan (Hill)

Adalah daerah bukit endapan dan ultra basalt, satuan punggung sendimen,metamorf dan vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentukwilayah bergelombang sampai agak berbukit. Luas satuan perbukitan iniadalah 4.123,64 Km<sup>2</sup> atau 15,79 % dari luas wilayah Kabupaten KutaiKartanegara.

9. Daerah pegunungan (Mountain).

Adalah daerah gunung endapan basalt dan ultra basalt, gunung batu pasirdengan lereng terpotong, punggung dan gunung karet yang permukaannyatidak rata, satuan punggung granit dan metamorf dan gunung strato vulkanikyang tererosi dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah agak berbukitsampai bergunung dengan variasi kelerengan kurang dari 26 % sampai lebihdari 60 % dan perbedaan tinggi lebih dari

300 meter. Luas satuan pegunungan ini adalah 3.342,31 Km<sup>2</sup> atau 12,8 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi :
  - (1) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
  - (2) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
  - (3) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
  - (4) meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
  - (5) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- b) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dengan strategi meliputi :
  - (1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
  - (2) meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
  - (3) mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - (4) mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.
- c) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi :
  - (1) mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - (2) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
  - (3) mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
  - (4) mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- d) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi :
  - (1) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - (2) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - (3) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - (4) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
  - (5) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
  - (6) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- e) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi :
  - (1) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;

- (2) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - (3) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - (4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- f) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
- (1) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
  - (2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
  - (3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
  - (4) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
  - (5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- g) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi :
- (1) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
  - (2) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
  - (3) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
  - (4) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
  - (5) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.
- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
- (1) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - (2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - (3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - (4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi – Misi – Sasaran Program Kukar IDAMAN Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih; telaah Renstra K/L dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemenuhan penyediaan pangan berkelanjutan  
Upaya mencapai manusia Indonesia yang berkualitas, sangat terkait erat dengan faktor pangan dan gizi. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun keragamannya.
2. Meningkatkan penggunaan paket teknologi pertanian  
Implementasi dari strategi peningkatan produktivitas diantaranya diwujudkan melalui mekanisme Pengelolaan Tanaman secara Terpadu (PTT). PTT memberikan inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait peningkatan produktivitas padi dan pendapatan petani sehingga peningkatan kesejahteraan petani dapat terwujud.
3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil pertanian yang efisien dan berdaya saing  
Pengolahan hasil pertanian dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, pemilihan (grading), pengepakan atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih, seperti penggilingan (milling), penepungan (powdering), ekstraksi dan penyulingan (extraction), penggorengan (roasting), pemintalan (spinning), pengalengan (canning) dan proses pabrikasi lainnya
4. Perubahan iklim dan tingkat serangan OPT  
Perubahan iklim karena pemanasan global (global warming) telah mengubah kondisi iklim global, regional, maupun lokal. Hal ini karena iklim merupakan unsur utama yang berpengaruh dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman, maka perubahan iklim global akan berdampak buruk terhadap keberlanjutan ketahanan tanaman. Perubahan iklim global akan mempengaruhi setidaknya tiga unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian, yaitu: (a) naiknya suhu udara yang juga berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama kelembaban dan dinamika atmosfer, (b) berubahnya pola curah hujan, (c) makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti El- Nino dan La-Nina, dan (d) naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di kutub.

5. Pemasaran hasil pertanian pangan, hortikultura dan peternakan  
Pemasaran produk pertanian yang baik, akan mendorong petani menghasilkan pangan melebihi kebutuhan rumah tangga. Petani akan memasarkan sebagian produksinya setelah dikurangi untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (marketed surplus atau marketable surplus). Hasil panen yang dijual digunakan oleh petani untuk membayar tenaga kerja, sarana produksi, sewa lahan, maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Pemasaran juga memberi insentif kepada petani agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen serta mengikuti standar pemasaran yang berlaku. Bahkan petani bersedia memproduksi pangan yang bukan merupakan pangan pokok karena produknya laku dijual dan menguntungkan
6. Pengembangan kawasan strategis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan  
Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang
7. Ketersediaan waduk, embung dan jaringan irigasi  
Secara kuantitas, permasalahan air bagi pertanian terutama di lahan kering adalah persoalan ketidakesesuaian air antara kebutuhan dan pasokan menurut waktu (temporal) dan tempat (spatial). Persoalan ini menjadi semakin kompleks, rumit dan sulit diprediksi karena pasokan air terganggu dari sebaran curah hujan di sepanjang tahun yang sebenarnya tidak merata walau di musim penghujan sekalipun. Untuk itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam bidang sumber daya air dan teknologi tepat guna untuk mengatur ketersediaan air agar dapat memenuhi kebutuhan air yang semakin sulit dilakukan dengan cara-cara ilmiah.
8. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara  
Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan

adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

9. Infrastruktur Jalan Usaha Tani

Syarat pokok dan syarat pelancar pembangunan pertanian tersebut tidak dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh syarat pengangkutan (transportasi) yang memadai. Ekonomi pada hakikatnya terhubung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap manusia. Hal ini juga sama halnya dengan peranan transportasi bagi ekonomi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat diperlukan untuk terwujudnya pembangunan pertanian. Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan pertanian

10. Tingkat kesejahteraan petani

Penanda kesejahteraan petani dengan NTP dapat didekati dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat kebutuhannya, Penanda tersebut adalah merupakan ukuran kemampuan rumah tangga petani didalam memenuhi kebutuhan subsistennya didefinisikan merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga dengan pengeluaran total rumah tangga. Pendapatan total rumah tangga pertanian merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani, nilai dari berburuh tani, nilai hasil produksi usaha nonpertanian, nilai dari berburuh nonpertanian, dan lainnya (iriman dan lain-lain). Sedangkan pengeluaran petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk biaya produksi.

11. Produksi dan produktivitas tanaman pangan

Ruang untuk meningkatkan produktivitas masih sangat terbuka lebar, baik untuk komoditas tanaman pangan maupun hortikultura. Hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan produktivitas lahan dan produktivitas tenaga kerja. Secara konkret, dua hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan benih unggul, khususnya yang berasal dari bantuan pemerintah; peningkatan akses petani terhadap pupuk; penanganan serangan hama/OPT; penggunaan alat dan mesin pertanian (mekanisasi), baik prapanen maupun pasca panen untuk menekan kehilangan hasil produksi; perbaikan teknik budidaya perbaikan dan perluasan akses jaringan irigasi; modifikasi cuaca untuk mitigasi dampak perubahan iklim; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian yang difokuskan pada petani muda; penguatan kelembagaan petani melalui keanggotaan kelompok tani; dan peningkatan akses petani terhadap teknologi informasi.

## 12. Produksi dan populasi ternak

Kutai Kartanegara telah berhasil dalam swasembada daging ayam dan telur, namun data statistika peternakan, mengungkapkan bahwa Kutai Kartanegara belum dapat memenuhi tingkat konsumsi daging masyarakat yang semakin menanjak tiap tahunnya seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Laju konsumsi daging sapi belum dapat tertutupi dengan laju produksi daging sapi di kabupaten untuk itu diimbangi dengan pembenahan industri sapi potong agar bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di kabupaten dan dari berbagai kajian, terungkap bahwa titik krusialnya adalah pada industri perbibitan. Meski tak mudah langkah-langkah konkrit tetap harus dilakukan, untuk mengidentifikasi, memetakan permasalahan dan mencari solusi pragmatik, bahkan merevisi agar swasembada daging dapat terwujud.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan dan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan.

Untuk pencapaian Misi (3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka ditetapkanlah tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Tujuan tersebut di ukur dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produktivitas Padi dan Jagung;
2. Meningkatnya produksi komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produksi Padi, Jagung, Palawija dan Hortikultura;
3. Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator sasaran produksi daging dan telur; serta
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator sasaran Nilai Tukar Petani (NTP).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat dilihat pada tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2022-2026 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN dan SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
				2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1 Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	1.72	1.97	1.97	2.22	2.47	2.72	2.97	2.97
		2 Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Peternakan	Persen	0.30	0.31	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35
1.1	Meningkatnya produktivitas Komoditas Pertanian	1 Padi	Ton/Ha	3.47	3.62	3.62	3.79	3.96	4.16	4.39	4.39
		2 Jagung	Ton/Ha	5.33	5.56	5.56	5.81	6.08	6.38	6.74	6.74
1.2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1 Padi	Ton	110,940	117,596.40	117,596.40	118,705.80	119,815.20	120,924.60	122,034.00	122,034.00
		2 Jagung	Ton	9,297	9,699.56	29,401.00	54,246.00	86,895.00	131,463.00	199,317.00	199,317.00
		3 Palawija	Ton	-	-	250.00	385.00	540.00	715.00	910.00	910.00
		4 Hortikultura		104,323	105,003	106,539	108,303	110,119	112,008	113,960	115,356
1.3	Meningkatnya Produksi Peternakan	1 Daging	Kg	13,491,456	13,761,000	14,036,000	14,317,000	14,603,000	15,000,000	15,200,000	15,200,000
		2 Telur	Kg	1,502,532	1,547,000	1,594,000	1,641,000	1,691,000	1,741,000	1,794,000	1,794,000
1.4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	95.97	98.37	98.37	101.07	104.11	107.44	111.09	111.09

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun strategi guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan .

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada misi 3 “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”,

Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dengan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta produksi dan populasi ternak dan kesejahteraan petani, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Peningkatan Produksi Daging dan Telur;
3. Meningkatkan Manajemen Usaha Tani; dan
4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang, seperti pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan					
	Mengembangkan Pertanian berbasis kawasan					
	Perbaikan sistem pertanian dari hulu sampai hilir					
	Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura					
Peningkatan Produksi Daging dan Telur serta Populasi Ternak	Mengembangkan peternakan pola integrasi					
	Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis					
	Penerapan Teknologi Peternakan					
Meningkatkan manajemen usaha tani dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditas pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya petani					
	Mempermudah akses permodalan					
	Hilirisasi produk pertanian					

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Indikator kinerja merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil, lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat melalui analisis dan evaluasi yang cermat, menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil serta mengacu pada indikator kinerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Pertanian dan Peternakan di kabupaten Kutai Kartanegara.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode lima tahun mulai 2021 sampai dengan 2026 seperti yang tertuang dalam RPJMD, disajikan dengan 3 (tiga) aspek, meliputi:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum; menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut, lebih difokuskan dalam pencapaian pada aspek pelayanan umum.

Selengkapnya mengenai penetapan indikator kinerja program dan sasaran menurut RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 ditunjukkan pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian				Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan																	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan				Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	CC	B		B		B		B		B		B				
				Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjut	Persen	0	100		100		100		100		100		100				
Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan berdasarkan data				Validasi data dalam rangka perumusan kebijakan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	0	100		100		100		100		100		100				
		1 01 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	54.35	60	65,360,181,836	62	66,822,181,838	64	66,822,181,840	66	66,822,181,842	68	66,822,181,844	68	332,648,909,200		
		1 01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	685,000,000	13	785,000,000	13	785,000,000	13	785,000,000	13	785,000,000	63	3,825,000,000		
		1 01 01	2.01 01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	6	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	30	1,750,000,000		
		1 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	4	140,000,000		
		1 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	175,000,000		
		1 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DKA-SKPD	Dokumen	0	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000		
		1 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	0	0	-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	4	140,000,000		
		1 01 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	4	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	16	1,500,000,000		
		1 01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel</b>	Laporan	0	17	56,104,043,000	17	56,004,043,000	17	56,004,043,000	17	56,004,043,000	17	56,004,043,000	85	280,120,215,000		
		1 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Orang	481	481	55,335,606,000	481	55,335,606,000	481	55,335,606,000	481	55,335,606,000	481	55,335,606,000	2405	276,678,030,000		
		1 01 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang	15	15	360,000,000	15	360,000,000	15	360,000,000	15	360,000,000	15	360,000,000	75	1,800,000,000		
		1 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	1	48,437,000	1	48,437,000	1	48,437,000	1	48,437,000	1	48,437,000	5	242,185,000		
		1 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	16	360,000,000	16	260,000,000	16	260,000,000	16	260,000,000	16	260,000,000	80	1,400,000,000		
		1 01 01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen	1	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	5	280,325,000		
		1 01 01	2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	1	56,065,000	5	280,325,000		
		1 01 01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	Dokumen	2	2	91,167,000	2	1,053,167,000	2	1,053,167,000	2	1,053,167,000	2	1,053,167,000	10	4,303,835,000		
		1 01 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	0	0	-	481	481,000,000	481	481,000,000	481	481,000,000	481	481,000,000	1924	1,924,000,000		
		1 01 01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Pegawai	Orang	0	0	-	481	481,000,000	481	481,000,000	481	481,000,000	481	481,000,000	1924	1,924,000,000		
		1 01 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	10	10	74,936,000	10	74,936,000	10	74,936,000	10	74,936,000	10	74,936,000	50	374,680,000		
		1 01 01	2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	15	16,231,000	15	16,231,000	15	16,231,000	15	16,231,000	15	16,231,000	75	811,555,000		
		1 01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Layanan	8	8	1,626,122,755	8	1,626,122,755	8	1,626,122,755	8	1,626,122,755	8	1,626,122,755	40	8,130,613,775		
		1 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	7	47,076,700	7	47,076,700	7	47,076,700	7	47,076,700	7	47,076,700	35	235,383,500		
		1 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	20	20	776,582,055	20	776,582,055	20	776,582,055	20	776,582,055	20	776,582,055	100	3,882,910,275		
		1 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	4	4	245,000,000	4	245,000,000	4	245,000,000	4	245,000,000	4	245,000,000	20	1,225,000,000		
		1 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1). Buku 2). Lembar 3). Bual Eslemplar	3	3	49,475,000	3	49,475,000	3	49,475,000	3	49,475,000	3	49,475,000	15	247,375,000		
		1 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan		2000	2000	24,000,000	2000	24,000,000	2000	24,000,000	2000	24,000,000	2000	24,000,000	10000	120,000,000		
		1 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dielenggarakan	Orang/Tugas	400	400	418,565,000	400	418,565,000	400	418,565,000	400	418,565,000	400	418,565,000	2000	2,092,825,000		
		1 01 01	2.06 10	Penatausahaan Ansis Dinamis pada SKPD	Jumlah Ansis pada Unit Pencipta dan Pengolah Ansis (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	Berkas	650	650	65,424,000	650	65,424,000	650	65,424,000	650	65,424,000	650	65,424,000	3250	327,120,000		
		1 01 01	2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi															
		1 01 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Unit	2	50	492,350,480	50	992,350,480	50	992,350,480	50	992,350,480	50	992,350,480	250	4,461,752,400		
		1 01 01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tidak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tidak	Unit	0	0	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,200,000,000		
		1 01 01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000		
		1 01 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	492,350,480	2	492,350,480	2	492,350,480	2	492,350,480	2	492,350,480	10	2,461,752,400		
		1 01 01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bulan	12	12	4,772,757,601	12	4,772,757,603	12	4,772,757,605	12	4,772,757,607	12	4,772,757,609	60	23,863,788,025		
		1 01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	1,991,000	12	1,991,000	12	1,991,000	12	1,991,000	12	1,991,000	60	9,955,000		
		1 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	654,084,564	12	654,084,564	12	654,084,564	12	654,084,564	12	654,084,564	60	3,270,422,820		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
							2022		2023		2024		2025		2026		2027														
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	95,832,000	12	95,832,000	12	95,832,000	12	95,832,000	12	95,832,000	60	479,160,000	18 Kecamatan									
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	4,020,850,028	12	4,020,850,028	12	4,020,850,028	12	4,020,850,028	12	4,020,850,028	60	20,104,250,140	18 Kecamatan								
							2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>1,532,676,000</b>	<b>340</b>	<b>1,532,676,000</b>	<b>340</b>	<b>1,532,676,000</b>	<b>340</b>	<b>1,532,676,000</b>	<b>340</b>	<b>1,532,676,000</b>	<b>1700</b>	<b>7,663,380,000</b>									
							01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2	139,106,000	2	139,106,000	2	139,106,000	2	139,106,000	2	139,106,000	10	695,530,000	18 Kecamatan								
							02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	215	215	698,570,000	215	698,570,000	215	698,570,000	215	698,570,000	215	698,570,000	1075	3,492,850,000	18 Kecamatan								
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	75	75	200,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	375	1,000,000,000	18 Kecamatan								
							09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	48	48	495,000,000	48	495,000,000	48	495,000,000	48	495,000,000	48	495,000,000	240	2,475,000,000	18 Kecamatan								
Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian		3	27	02			<b>Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>Persen</b>	<b>1,72</b>	<b>1,97</b>	<b>2,22</b>	<b>2,47</b>	<b>2,72</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>																
							<b>Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan</b>	<b>Persen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,31</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>																
Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian		3	27	02			Padi	Ton	110,940	117,596,40	118,705,80	119,815,20	120,924,60	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00	122,034,00								
							Jagung	Ton	9,297	29,401	54,246	86,895	131,463	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317	199,317					
							Palawija (Porang)	Ton		250	385	540	715	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910				
							Hortikultura	Ton	104,323	106,539	108,303	110,119	112,008	113,960	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356	115,356				
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3	27	02			Luas Tanam Padi	Ha	38,706	39,867	40,254	40,641	41,802	42,577	42,577	42,577	42,577	42,577	42,577	42,577	42,577	42,577									
							Luas Tanam Jagung	Ha	2,878	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						
							Luas Tanam Palawija (porang)	Ha	14	25	35	45	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
							Luas Tanam Hortikultura	Ha	23,449	26,198	26,987	27,782	29,278	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201	30,201				
							Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	32,758	34,416	35,275	36,157	37,061	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988	37,988				
							Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	16,706	17,124	17,552	17,991	18,440	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901	18,901			
							Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15,023,497	15,936,000	16,415,000	16,908,000	17,414,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000	17,938,000			
							Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian		3	27	02	2.01		Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	Unit	26,291	26,308	8,400,000,000	10,984	9,210,000,000	10,984	9,210,000,000	10,984	9,210,000,000	10,984	9,210,000,000	10,984	45,240,000,000			
3.02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kawasan	0	5								-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	800,000,000	18 Kecamatan						
02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas Lahan yang dikelola UPT/BPP	Ha	-								3	430,000,000	3	430,000,000	3	430,000,000	3	430,000,000	3	430,000,000	15	2,150,000,000	18 Kecamatan					
Meningkatkan Produktivitas Peternakan		3	27	02	2.02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Kota</b>	<b>Komoditi</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>200,000,000</b>	<b>21</b>	<b>600,000,000</b>	<b>26</b>	<b>600,000,000</b>	<b>31</b>	<b>600,000,000</b>	<b>36</b>	<b>600,000,000</b>	<b>36</b>	<b>2,600,000,000</b>										
							3.02	2.02	01	Penjaminan Kemurnaan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnaan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Komoditi	11	-	-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	36	800,000,000	18 Kecamatan					
							02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Komoditi	11	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	36	1,000,000,000	18 Kecamatan					
							02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Komoditi	11	-	-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	36	800,000,000	18 Kecamatan					
Meningkatkan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	27	02	2.03		<b>Daging</b>	<b>Kg</b>	<b>13,491,456</b>	<b>14,036,000</b>	<b>14,317,000</b>	<b>14,603,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>15,200,000</b>									
							<b>Telur</b>	<b>Kg</b>	<b>1,502,532</b>	<b>1,594,000</b>	<b>1,641,000</b>	<b>1,691,000</b>	<b>1,741,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,794,000</b>							
Meningkatkan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	27	02	2.03		<b>Cakupan Pengawasan</b>	<b>Jenis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2</b>	<b>150,000,000</b>	<b>8</b>	<b>600,000,000</b>										
							3.03	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Rekomendasi Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dokumen	-	-	-	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	16	300,000,000	18 Kecamatan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
1	2	3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Ternak	Cakupan pengendalian dan pengawasan	Data Pengawasan	-	-	-	2	275,000,000	2	275,000,000	2	275,000,000	2	275,000,000	8	1,100,000,000				
		3	27	02	2.05	01	Pengamanan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah sosialisasi	Pelaku Usaha Peternakan	-	-	10	55,000,000	15	55,000,000	20	55,000,000	25	55,000,000	70	220,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Benih dan Bibit yang diuji	Sampel	0	0	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	400	220,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Peredaran Benih/bibit ternak yang diawasi	Dokumen SKKH	0	0	50	55,000,000	50	55,000,000	50	55,000,000	50	55,000,000	200	220,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Facilitasi Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Facilitasi	0	0	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	4	220,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan	Kali	0	0	15	55,000,000	15	55,000,000	15	55,000,000	15	55,000,000	60	220,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor	231	362	3,405,000,000	322	3,205,000,000	322	3,205,000,000	322	3,205,000,000	322	3,205,000,000	1650	16,225,000,000			
		3	27	02	2.06		Tersedianya Hijauan Pakan ternak	Stek/Pols	0	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	75000	500,000,000		
		3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan bibit Ternak Sapi	Ekor	182	92	1,105,000,000	92	1,105,000,000	92	1,105,000,000	92	1,105,000,000	92	1,105,000,000	460	5,525,000,000	18	Kecamatan	
							Pengadaan bibit Ternak Kambing	Ekor	49	200	1,000,000,000	160	800,000,000	160	800,000,000	160	800,000,000	160	800,000,000	840	4,200,000,000	18	Kecamatan		
							Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Ekor	0	20	800,000,000	20	800,000,000	20	800,000,000	20	800,000,000	20	800,000,000	100	4,000,000,000	18	Kecamatan		
							Pengadaan bibit Ternak babi	Ekor	0	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	250	2,500,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	Stek/Pols	0	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	15,000	100,000,000	75000	500,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03			<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				<b>40,933,000,000</b>		<b>26,461,000,000</b>		<b>26,861,000,000</b>		<b>26,461,000,000</b>		<b>26,461,000,000</b>		<b>147,177,000,000</b>				
							<b>1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun</b>	<b>Meter</b>	<b>99500</b>	<b>24000</b>		<b>33000</b>		<b>20000</b>		<b>12500</b>		<b>10500</b>		<b>100000</b>					
							<b>2. Jumlah Embung Yang di Bangun</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>14</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>21</b>		<b>19</b>		<b>100</b>					
		3	27	03	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>800,000,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>5</b>	<b>4,800,000,000</b>			
		3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/UP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Lahan LP2B/KP2B/LCP2B yang dikembangkan	Ha	0	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	5	4,000,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/UP2B	Jumlah Dokumen Peta Komoditas Pertanian	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	0	0	-	18	200,000,000	18	200,000,000	18	200,000,000	18	200,000,000	18	800,000,000			
		3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	<b>Unit</b>	<b>172</b>	<b>75</b>	<b>40,133,000,000</b>	<b>116</b>	<b>25,461,000,000</b>	<b>130</b>	<b>25,861,000,000</b>	<b>127</b>	<b>25,461,000,000</b>	<b>139</b>	<b>25,461,000,000</b>	<b>587</b>	<b>142,377,000,000</b>			
		3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Meter	78,375	14,664	10,998,000,000	20,000	6,900,000,000	17,000	6,900,000,000	10,000	6,900,000,000	7,500	6,900,000,000	69,164	38,598,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Embung Pertanian	Unit	5	14	7,000,000,000	23	4,611,000,000	23	4,611,000,000	21	4,611,000,000	19	4,611,000,000	100	25,444,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Meter	99,500	24,000	16,960,000,000	33,000	10,900,000,000	20,000	11,300,000,000	12,500	10,900,000,000	10,500	10,900,000,000	100,000	60,960,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Dam Parit	Unit	16	4	1,900,000,000	5	900,000,000	6	900,000,000	4	900,000,000	3	900,000,000	22	5,500,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Pintu Air	Unit	128	19	2,725,000,000	35	800,000,000	33	800,000,000	19	800,000,000	19	800,000,000	125	5,925,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Rehabilitasidan pemeliharaan)	Rumah potong hewan higienis dan terjamin. (Rehabilitasidan pemeliharaan)	Unit	-	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	-	0	-	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,600,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	Unit	10	15	200,000,000	20	200,000,000	25	200,000,000	30	200,000,000	35	200,000,000	125	1,000,000,000	18	Kecamatan	
							Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	Unit	10	15	100,000,000	20	100,000,000	25	100,000,000	30	100,000,000	35	100,000,000	125	500,000,000	18	Kecamatan		
							Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan pagar pembatas	Meter	5,000	10,000	200,000,000	15,000	200,000,000	20,000	200,000,000	25,000	200,000,000	30,000	200,000,000	100,000	1,000,000,000	18	Kecamatan		
							Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	Unit	3	8	50,000,000	13	50,000,000	18	50,000,000	23	50,000,000	28	50,000,000	90	250,000,000	18	Kecamatan		
							Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	Ha	-	0	-	11	200,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	44	800,000,000	18	Kecamatan		
		3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				<b>100,000,000</b>		<b>975,000,000</b>		<b>975,000,000</b>		<b>975,000,000</b>		<b>975,000,000</b>		<b>4,000,000,000</b>				
							<b>1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>92</b>		<b>94</b>		<b>95</b>		<b>96</b>		<b>97</b>							
							<b>2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan ( Ternak yang akan dipotong, daging, telur, susu dan produk olahan)</b>	<b>Jumlah/Jenis Produk Hewan</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>							
		3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Waboh Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,100,000,000			
		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Derajat Kesehatan Ternak pada masyarakat	Persen	0	65	100,000,000	65	100,000,000	65	100,000,000	65	100,000,000	65	100,000,000	65	500,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Sample Darah untuk Uji Jembrana dan Brucellosis Sebanyak 150 Ekor / Tahun	Ekor	-	-	-	150	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000	600	200,000,000	18	Kecamatan	
		3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penurunan Wabah Penyakit Menular	Kasus	-	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	400,000,000	18	Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3 27 04 2.02	Pengawasan Pemusakan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	0	0	-	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	800,000,000		
		3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Identifikasi Risiko Penyakit hewan dan keamanan Produk Hewan	Kasus	0	0	-	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	12	400,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusakan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas penerapan Teknis untuk pemusakan dan/atau pengeluaran hewan	Jenis	0	0	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	400,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jenis	0	0	-	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	8	1,200,000,000		
		3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Pengiriman Sampel Produk Peternakan	Sampel	0	0	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	400,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Unit Pelayanan	Unit	0	0	-	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	8	800,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	0	0	-	3	225,000,000	3	225,000,000	3	225,000,000	3	225,000,000	12	900,000,000		
		3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Unit Usaha yang didampingi	Unit	0	0	-	7	75,000,000	7	75,000,000	7	75,000,000	7	75,000,000	28	300,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan sampel produk asal hewan (Bakso, Adonan dr penggilingan, dll) dari cemaran bahan yang tak ASUH (aman sehat utuh dan halal)	Sampel	0	0	-	30	75,000,000	30	75,000,000	30	75,000,000	30	75,000,000	120	300,000,000		18 Kecamatan
		3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mengujian sampel produk asal hewan (Bakso, Adonan dr penggilingan, dll) dari cemaran bahan yang tak ASUH (aman sehat utuh dan halal)	Sampel	0	0	-	70	75,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	280	300,000,000		18 Kecamatan
		3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persen	75	80	150,000,000	85	3,050,000,000	90	3,050,000,000	95	3,050,000,000	100	3,050,000,000	100	12,350,000,000		
		3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	Ha	0	2,000	150,000,000	2,400	3,050,000,000	2,400	3,050,000,000	2,400	3,050,000,000	2,400	3,050,000,000	11600	12,350,000,000		
		3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Serangan OPT Pertanian	Ha	0	2,000	150,000,000	2,000	1,100,000,000	2,000	1,100,000,000	2,000	1,100,000,000	2,000	1,100,000,000	10000	4,550,000,000		18 Kecamatan
		3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan Pertanian yang di kelola	Ha	0	0	-	200	500,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	800	2,000,000,000		18 Kecamatan
		3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Brigade Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan Pertanian	Kelompok	-	0	-	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	72	1,200,000,000		18 Kecamatan
		3 27 05 2.01 04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase penanggulangan Derajat Kesehatan Ternak pada masyarakat	Persen	0	0	-	85	150,000,000	90	150,000,000	95	150,000,000	95	150,000,000	95	600,000,000		18 Kecamatan
		3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas Lahan Replanting	Ha	0	0	-	200	1,000,000,000	200	1,000,000,000	200	1,000,000,000	200	1,000,000,000	800	4,000,000,000		18 Kecamatan
		3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	0	0	-	35	400,000,000	35	400,000,000	35	400,000,000	35	400,000,000	140	1,600,000,000		
		3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	0	-	-	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	80	1,000,000,000		
		3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Pelaku	0	0	-	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	80	1,000,000,000		18 Kecamatan
		3 27 06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	Dokumen	0	0	-	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	60	600,000,000		
		3 27 06 2.02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi	Dokumen	0	0	-	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	60	600,000,000		18 Kecamatan
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani			Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	95.97	98.37		101.07		104.11		107.44		111.09		111.09			
		3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Cakupan kelompok tani naik kelas</b>	Persen	1	2	400,000,009	3	7,800,000,011	3	7,400,000,013	4	7,800,000,015	5	7,800,000,017	17	31,200,000,065		
		3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	Persen	75	80	400,000,009	85	7,800,000,011	90	7,400,000,013	95	7,800,000,015	100	7,800,000,017	100	31,200,000,065		
		3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/keurahan (BPP, Posluhan, Taman Teknologi Pertanian dan P4S) yang di bina dan ditumbuhkan	Kelembagaan Penyuluhan	73	73	150,000,000	73	3,000,000,000	73	3,000,000,000	73	3,000,000,000	73	3,000,000,000	73	12,150,000,000		18 Kecamatan
				Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	BPP															
				Rapat Teknis BPP	BPP															
				Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	Orang															
				Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	Orang															
				Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	BPP															
				Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/keurahan	Posluhdes															
				Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	P4S															
				Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	TTP															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/pendampingan/pemumbuhan	Kelembagaan Petani	2,676	2,743	250,000,000	2,743	2,200,000,000	2,743	2,200,000,000	2,743	2,200,000,000	2,743	2,200,000,000	2,743	9,050,000,000	18	Kecamatan	
							Pembinaan dan Pemumbuhan Kelompok Tani Dewasa	Kelompok Tani Dewasa																	
							Pembinaan dan Pemumbuhan Kelompok Wanita Tani	Kelompok Wanita Tani																	
							Pembinaan dan pemumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	Kelompok Taruna Tani																	
							Facilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug, Peda dan Panas)	KTNA																	
							Pembinaan dan pemumbuhan Asosiasi Petani	Asosiasi Petani																	
							Pembinaan dan Pemumbuhan Gapoktan	Gapoktan																	
							Lomba Asah Terampil Petani	Kelompok Tani																	
							Kontes Produk Pertanian	Kelompok Tani																	
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan Penyuluhan	0	0	-	5	2,000,000,000	4	1,600,000,000	5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	19	7,600,000,000	18	Kecamatan	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	BPP																	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	Posluhdes																	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (PMS)	PMS																	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tana Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	TTP																	
							Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	Posluhdes																	
		3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Pemumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kelembagaan Ekonomi Petani	-	-	-	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	18	300,000,000	72	1,200,000,000	18	Kecamatan	
							Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	Kios Saprodi																	
							Pengembangan dan Pemumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	LKMA																	
							Pengembangan dan pemumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	UPJA																	
		3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sekolah Lapang	Orang	0	-	-	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	400	1,200,000,000	18	Kecamatan	

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan OPD di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari teknis pengembangan subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor pertanian (khususnya subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai. Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang sebagai keuntungan usaha. Meskipun begitu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Secara umum indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu seperti yang termuat dalam tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>TUJUAN :</b>									
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	1,72	1.97	2.22	2.47	2.72	2.97	2.97
		Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Persen	0,3	0.31	0.33	0.34	0,35	0,35	0,35
<b>II</b>	<b>SASARAN :</b>									
2.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	-	100	100	100	100	100	100
2.2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	Ton/Ha	3.47	3.62	3.79	3.96	4.16	4.39	4.39
		Jagung	Ton/Ha	5.33	5.56	5.81	6.08	6.38	6.74	6.74
2.3	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	Ton	110,940	117,596.40	118,705.80	119,815.20	120,924.60	122,034.00	122,034.00
		Jagung	Ton	9,297	29,401.00	54,246.00	86,895.00	131,463.00	199,317.00	199,317.00
		Palawija	Ton	-	250.00	385.00	540.00	715.00	910.00	910.00
		Hortikultura	Ton	104,323	106,539	108,303	110,119	112,008	113,960	115,356
2.4	Meningkatnya Produksi Peternakan	Daging	Kg	13,491,456	14,036,000	14,317,000	14,603,000	15,000,000	15,200,000	15,200,000
		Telur	Kg	1,502,532	1,594,000	1,641,000	1,691,000	1,741,000	1,794,000	1,794,000
2.6	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	95.97	98.37	101.07	104.11	107.44	111.09	111.09
<b>III</b>	<b>PROGRAM :</b>									
3.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	54.35	60	62	64	66	68	68
3.2	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha	38,706	39,867.18	40,254.24	40,641.30	41,802.48	42,576.60	42,576.60
		Luas Tanam Jagung	Ha	2,878	3,000	7,500	13,000	20,000	30,000	30,000
		Luas Tanam Palawija	Ha	14	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	65
		Luas Tanam Hortikultura	Ha	23,449	26,197.87	26,987.26	27,781.65	29,278.24	30,200.81	30,201
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	32,758	34,416	35,275	36,157	37,061	37,988	37,988
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	16,706	17,124	17,552	17,991	18,440	18,901	18,901
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15,023,497	15,936,000	16,415,000	16,908,000	17,414,000	17,938,000	17,938,000

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	Meter	-	24,000	33,000	20,000	12,500	10,500	100,000
		2. Jumlah Embung Yang di Bangun	Unit	-	14	23	23	21	19	100
3.4	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	Persen	90	92	94	95	96	97	97
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan ( Ternak yang akan dipotong, daging, telur, susu dan produk olahan)	Jumlah/Jenis Produk Hewan	3	5	5	5	5	5	5
3.5	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	85	90	95	100	100
3.6	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	-	-	35	35	35	35	140
3.7	PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani naik kelas	Persen	1	2	3	3	4	5	17
<b>IV.</b>	<b>KEGIATAN</b>									
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	12	11	11	11	11	11	55
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	-	17	17	17	17	17	85
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	8	8	8	8	40
4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	2	50	50	50	50	50	250
4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	340	340	340	340	340	1700
4.9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	Unit	31	48	65	82	99	116	116
4.10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	11	16	21	26	31	36	36
4.11	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	Jenis	-	-	2	2	2	2	8
4.12	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan	Data Pengawasan	-	-	2	2	2	2	8

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.13	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor	231	362	362	362	362	362	1810
		Tersedianya Hijauan Pakan ternak	Stek/Pols	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75000
4.14	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	5
4.15	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	172	75	116	130	127	139	587
4.16	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.17	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	-	-	2	2	2	2	2
4.18	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jenis	-	-	2	2	2	2	8
4.19	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	-	-	3	3	3	3	12
4.20	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	Ha	-	2,000	2,400	2,400	2,400	2,400	11600
4.21	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	-	-	20	20	20	20	80
4.22	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	Dokumen	-	-	15	15	15	15	60
4.23	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	Persen	75	80	85	90	95	100	100

## BAB VIII. PENUTUP

Rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan umum dalam RPJMD memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi **KUKAR IDAMAN (Inovatif, DAYa Saing dan MANDiri)**, sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesesuaian Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**, Renstra SKPD ini akan diturunkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja SKPD).